

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara pada dasarnya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan berlangsungnya aktivitas ekonomi yang terus berjalan diharapkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di setiap periode. Keberhasilan suatu negara dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya tercermin melalui besarnya pendapatan yang diperoleh, yang dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun (Sultan et al., 2023). Peningkatan pendapatan tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, tingkat pendapatan nasional mencerminkan kondisi perekonomian serta laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Sebagai negara yang masih dalam tahap berkembang, Indonesia kerap dihadapkan pada persoalan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, yang salah satunya ditandai oleh tingginya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Kondisi ini seringkali berujung pada meningkatnya angka kemiskinan, yang pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi prioritas utama karena menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Artinya, pertumbuhan ekonomi membuka peluang bagi pembangunan di berbagai sektor. Menurut teori yang dikemukakan oleh Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan

kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakatnya. Kemampuan ini bertumbuh seiring dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian pada sistem kelembagaan dan ideologi (Jingan, 2010 dalam Silaban et al., 2020).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi yang sangat stabil dinilai penting. Hal ini karena dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, menurunkan tingkat buta huruf, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, negara juga dapat lebih fokus pada sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan nasional pun meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor penting lainnya. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi langkah utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu negara yang ditunjukkan melalui bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Umumnya, hal ini tercermin dari naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) secara riil. Para ekonom telah lama mengkaji berbagai faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Berdasarkan pengalaman dari banyak negara, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alam dan lahan, kualitas serta jumlah tenaga kerja, ketersediaan barang modal, kemajuan teknologi, dan sistem sosial serta pola pikir masyarakat (Badrudin, 2012 dalam Silaban et al., 2020).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama untuk melihat sejauh mana pembangunan suatu negara dapat dikatakan berhasil. Pemerintah Indonesia memahami bahwa pembangunan nasional merupakan langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, berbagai program pembangunan difokuskan pada pengembangan wilayah, terutama daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah ini dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan menyesuaikan prioritas serta kebutuhan masing-masing wilayah. Pelaksanaannya tetap mengacu pada arah dan sasaran pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek.

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan antar wilayah. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi dasar dalam mendukung pembangunan di sektor-sektor lainnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hutauruk, 2021).

Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan dalam kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara terus-menerus menuju situasi yang dianggap lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menekankan pada proses yang berlangsung, bukan sekedar

gambaran keadaan ekonomi pada satu waktu tertentu. Fokus utamanya terletak pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dari waktu ke waktu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan hak, kewenangan, serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah adalah melalui penerapan kebijakan pembangunan daerah dengan konsep kawasan andalan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Pembangunan sendiri merupakan kegiatan yang terus berlangsung tanpa akhir, berorientasi pada proses transformasi yang bertujuan meningkatkan produksi, pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat (Meo et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai tahapan, mekanisme, dan proses perencanaan guna menjamin keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJP, RPJM, dan RKP/RKPD, yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara bersama masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam wilayah yang luas,

biasanya terdapat perbedaan dalam hal potensi, kemampuan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Perbedaan tersebut sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan daerah bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kesenjangan dalam tingkat pembangunan, penting untuk menyesuaikan kegiatan pembangunan dengan potensi dan kemampuan setiap daerah.

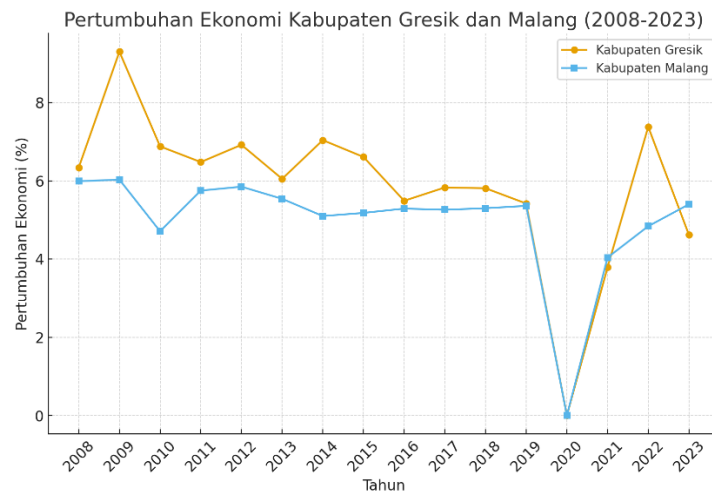
Jika upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dibiarkan berjalan tanpa pengaturan yang tepat, maka hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar wilayah maupun antar kawasan. Kesenjangan tersebut timbul akibat adanya perbedaan letak geografis, kondisi alam, serta situasi yang unik di masing-masing daerah. Akibatnya, daerah dengan potensi besar cenderung semakin maju, sementara daerah dengan keterbatasan sumber daya justru semakin tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai dengan semakin meratanya distribusi pendapatan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi umum yang diterapkan adalah industrialisasi, yang biasanya difokuskan pada lokasi-lokasi tertentu sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*). Melalui pendekatan ini, diharapkan akan muncul efek penyebaran (*spread effect*) dari pusat pertumbuhan tersebut ke wilayah sekitarnya, sehingga daerah di sekelilingnya dapat berkembang. Pengembangan wilayah yang berpusat pada titik-titik pertumbuhan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Dalam upaya pengembangan wilayah, pemerintah perlu mengidentifikasi dan menentukan wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi, sosial, dan kultural untuk dikembangkan, baik karena potensi alamiah yang dimiliki maupun hasil dari pembangunan sebelumnya. Untuk mendorong penyesuaian ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, pendekatan yang sering digunakan adalah konsep wilayah pengembangan berdasarkan batas-batas administratif. Kabupaten atau kota dalam suatu provinsi dinilai memiliki potensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan agar pembangunan dapat tersebar secara lebih merata antar kabupaten dan kota.

Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang merupakan contoh wilayah dengan potensi pengembangan yang menonjol di Jawa Timur, namun dengan karakteristik dan struktur ekonomi yang berbeda. Kabupaten Gresik, yang terletak di kawasan pantura dan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, berkembang sebagai pusat industri dan logistik dengan dukungan infrastruktur pelabuhan yang kuat serta kehadiran banyak perusahaan manufaktur besar. Sementara itu, Kabupaten Malang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Timur dan dikenal sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, serta pendidikan tinggi. Perbedaan orientasi ekonomi inilah yang menjadikan keduanya menarik untuk dianalisis dalam konteks pengaruh faktor-faktor seperti tingkat kesempatan kerja, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami dinamika di kedua wilayah ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga tujuan pemerataan pembangunan dan penguatan pusat pertumbuhan baru dapat tercapai secara optimal.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang Tahun 2008-2023



Gambar di atas menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang selama periode 2008 hingga 2023. Secara umum, kedua kabupaten mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, dengan pola yang cenderung mirip. Terlihat bahwa pada tahun 2020, keduanya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam akibat pandemi COVID-19, dimana Kabupaten Gresik mencatatkan pertumbuhan negatif sekitar -3,5% dan Kabupaten Malang sekitar -3%. Namun, setelah itu keduanya mengalami pemulihan yang cukup cepat di tahun 2021 dan mencapai puncaknya kembali pada tahun 2022. Meskipun secara rata-rata Kabupaten Gresik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Malang, perbedaan antara keduanya tidak terlalu signifikan. Pola ini mencerminkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten dipengaruhi oleh faktor eksternal yang hampir serupa, namun tetap memiliki karakteristik lokal yang membedakan respons masing-masing daerah terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang merupakan dua wilayah strategis di Jawa Timur dengan potensi ekonomi yang besar namun memiliki karakteristik

pembangunan yang berbeda. Kabupaten Gresik berkembang sebagai kawasan industri dan pelabuhan, sedangkan Kabupaten Malang lebih menonjol pada sektor pertanian, pendidikan, dan pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor ketenagakerjaan, investasi, dan belanja pemerintah. Setelah pandemi COVID-19, keduanya menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, menarik investasi yang berkualitas, dan mengelola belanja daerah secara efektif. Meskipun memiliki tujuan pembangunan yang sama, hasilnya belum tentu sebanding, sehingga diperlukan analisis komparatif untuk mengetahui sejauh mana perbedaan struktur ekonomi dan kebijakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Kabupaten Gresik merupakan wilayah industri strategis di Jawa Timur, yang masuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Struktur ekonominya sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, yang menyumbang lebih dari 40% terhadap PDRB (BPS Gresik, 2023). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mencapai 5,42% pada 2022, menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Peningkatan investasi, baik PMDN maupun PMA menjadi pendorong utama terhadap PDRB Kabupaten Gresik. Namun, kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Gresik relatif kecil. Selain itu, ketimpangan antar wilayah dan kurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri padat modal menjadi isu krusial, karena tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih sebesar 6,48%.

Berbeda dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dengan sektor pertanian, pendidikan, pariwisata, dan

UMKM sebagai penggerak utama. PDRB Kabupaten Malang tumbuh sebesar 4,87% pada 2022 (BPS Malang, 2023). Meskipun lebih rendah daripada Kabupaten Gresik, pertumbuhan ini relatif lebih merata dan inklusif, terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang lebih rendah (4,65%) dan tingginya partisipasi masyarakat dalam sektor informal dan UMKM. Belanja pemerintah di Kabupaten Malang juga cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan, terutama melalui program pengembangan desa, infrastruktur dasar, dan layanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Malang terletak pada rendahnya nilai tambah sektor primer dan terbatasnya skala produksi industri kreatif maupun agrowisata yang sedang tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan atau hasil produksi suatu negara yang terjadi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai proses dimana hasil produksi rata-rata tiap orang terus meningkat dalam kurun waktu yang panjang (Asmara & Wahed, 2024). Kemampuan ini meningkat berkat kemajuan teknologi, perubahan dalam sistem kelembagaan, dan penyesuaian ideologi yang sesuai dengan kondisi yang ada (Kuznets, 1971, dalam Simanungkalit, 2020). Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka suatu negara memiliki kapasitas perekonomian yang semakin besar dalam pertumbuhan ekonominya (Kusuma et al., 2024).

Tingkat kesempatan kerja merupakan gambaran sejauh mana penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mendapatkan akses ke dunia kerja, baik pekerjaan penuh waktu maupun paruh waktu. Tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal penting yang memiliki keterkaitan dalam

dalam pembangunan negara. Ketika ekonomi bertumbuh dengan baik, tingkat kesempatan kerja diharapkan memberikan lebih banyak peluang untuk masyarakat sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang dan kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera. Pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan lapangan kerja, karena pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan aktivitas produksi. Kegiatan produksi tentunya memerlukan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama.

Investasi merupakan penanaman modal, baik oleh investor domestik maupun asing yang dilakukan saat ini dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi domestik (PMDN) dan investasi asing (PMA) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, termasuk peningkatan PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing lokal (Murti & Sahara, 2019). Selain itu, penelitian terhadap 34 provinsi antara 2019-2023 juga menunjukkan bahwa PMDN dan PMA secara simultan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan pengaruh PMDN lebih dominan (Hasimah & Sukmawati, 2025).

Belanja pemerintah daerah adalah pengeluaran publik yang ditujukan untuk membiayai berbagai fungsi pemerintahan, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Penelitian empiris di Jawa Timur selama 2014-2018 menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan secara positif dan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif jangka panjang (Safitri et al., 2021). Selain itu, studi nasional terbaru (2018-2023) memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, serta mampu menarik investasi terutama

PMDN, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan untuk mengisi gap dari penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menganalisis satu wilayah regional secara keseluruhan, seperti penelitian yang menjelaskan tentang Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia (Murti & Sahara, 2019), penelitian ini melihat dampak pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dua daerah secara terpisah. Selain itu rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih panjang, yaitu 16 tahun, sedangkan penelitian sebelumnya biasanya hanya menggunakan rentang waktu 5 tahun saja, seperti penelitian yang berjudul Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023 (Hasimah & Sukmawati, 2025). Penelitian ini juga menunjukkan aspek kebaruan dari sisi variabel yang digunakan. Jika pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1-2 variabel independen, seperti penelitian yang berjudul Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur (Safitri et al., 2021), penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu tingkat kesempatan kerja, investasi, dan belanja pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat kesempatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang?
2. Apakah investasi PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang?

3. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kesempatan kerja, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dibandingkan Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang.
4. Mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh antara tingkat kesempatan kerja, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dibandingkan Kabupaten Malang.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat kesempatan kerja, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri dan Kabupaten Malang yang lebih didominasi oleh pertanian dan jasa. Penelitian ini bersifat komparatif dan menggunakan data sekunder tahunan periode 2008-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan secara kuantitatif untuk melihat perbedaan pengaruh antar variabel masing-masing daerah. Hasil

penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman empiris tentang bagaimana tingkat kesempatan kerja, investasi, dan belanja pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang. Hasil analisis dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu lembaga perencana pembangunan dan pelaku usaha untuk memahami faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan strategis yang mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.